

Etika Politik Dalam Pemanfaatan Ruang Publik

Umiyati Haris¹⁾

**¹⁾Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus,
Merauke, Papua Selatan - Indonesia**

email: umiyatih12@unmus.ac.id

(Diterima Januari 2023); Disetujui Februari 2023); Dipublikasikan Maret 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika politik dalam pemanfaatan ruang publik dalam kerangka negara demokrasi di Indonesia. Urgensi etika politik dalam pemanfaatan ruang publik adalah etika politik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang publik tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Ruang publik dalam penelitian ini adalah media massa. Penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik dalam menguraikan hasil penelitian. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika politik dibutuhkan dalam pemanfaatan ruang publik dengan alasan bahwa etika politik akan membatasi korporasi-korporasi media massa untuk menguasai secara penuh media untuk kepentingan pribadi mereka. Media-media massa yang dikuasai oleh elit politik kadang dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu, misalnya. Etika politik dalam pemanfaatan ruang publik khususnya media massa masih kurang penerapannya di Indonesia. Media massa memerlukan penerapan etika politik di dalamnya karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi dalam ruang publik di negara demokrasi. Sehingga, diperlukan etika politik dalam pemanfaatan ruang publik dalam kebebasan berekspresi, salah satunya adalah media massa.

Kata Kunci : *Etika Politik, Ruang Publik, Media Massa, Demokrasi*

Abstract

This research aims to analyse political ethics in the utilisation of public space within the framework of a democratic state in Indonesia. The urgency of political ethics in the utilisation of public space is that political ethics plays an important role in ensuring that the utilisation of public space does not violate human rights and principles of social justice. The public space in this research is the mass media. This research is qualitative with descriptive-analytic techniques in describing the research results. Data sources were obtained through literature searches. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model. The results show that political ethics is needed in the utilisation of public space on the grounds that political ethics will limit mass media corporations to fully control the media for their personal interests. Mass media controlled by political elites are sometimes used to win elections, for example. Political ethics in the utilisation of public space, especially mass media, is still lacking in Indonesia. Mass media requires the application of political ethics in it because it is related to freedom of expression in the public sphere in a democratic country. Thus, political ethics is needed in the utilisation of public space in freedom of expression, one of which is mass media.

Keywords: *Political Ethics, Public Space, Mass Media, Democracy*

PENDAHULUAN

Negara yang demokratis menjunjung tinggi hak warga negara dalam memperoleh akses informasi serta kebebasan berekspresi. Hal tersebut merupakan bagian dari hak-hak warga negara dalam bidang politik, yaitu turut serta berpartisipasi dalam pemilu serta adanya transparansi kebijakan pada publik. Sehingga, nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan etika dapat tercapai dalam kehidupan bernegara.

Nilai-nilai demokrasi seperti bebas, transparansi kebijakan, adil serta bertanggung jawab diperlukan dalam setiap bidang kehidupan bernegara, khususnya Indonesia. Sejak era Reformasi, kebebasan berekspresi dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk reformasi politik. Kebebasan masyarakat untuk mengakses ruang publik memberi banyak manfaat bagi peningkatan informasi dan kreativitas masyarakat melalui berbagai media massa seperti media cetak dan elektronik.

Akan tetapi, kebebasan dalam mengakses ruang publik tersebut membuat beberapa korporasi memanfaatkan ruang tersebut untuk meningkatkan keuntungannya. Ruang publik, seperti salah satunya adalah media massa merupakan ruang kebebasan berekspresi masyarakat yang digunakan oleh pemilik media untuk kepentingan pribadi mereka.

Pemanfaatan ruang publik dalam konteks politik sering kali menjadi arena di mana berbagai kepentingan, pandangan, dan aspirasi masyarakat bersilangan. Ruang publik adalah panggung utama di mana kekuasaan politik dipertontonkan dan kebijakan publik dibentuk. Oleh karena itu, penggunaan yang etis dan bertanggung jawab terhadap ruang publik dalam konteks politik sangatlah penting. Etika politik memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai demokratis yang mendasari masyarakat.

Pertama-tama, urgensi etika politik dalam pemanfaatan ruang publik tercermin dalam kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem politik yang sehat, warga negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan politik dibuat dan bagaimana sumber daya publik dimanfaatkan. Etika politik menuntut bahwa proses pengambilan keputusan politik harus terbuka untuk inspeksi publik, dan pemimpin politik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat.

Selanjutnya, etika politik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang publik tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Ruang publik adalah tempat di mana pluralitas masyarakat tercermin, dan oleh karena itu, penggunaannya harus memperhitungkan kepentingan semua kelompok dan individu, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Etika politik menekankan perlunya menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa setiap keputusan politik memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, urgensi etika politik dalam pemanfaatan ruang publik juga terkait dengan kebutuhan akan integritas dan moralitas dalam tindakan politik. Para pemimpin politik harus bertindak dengan jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau partisan. Etika politik menuntut bahwa korupsi, nepotisme, dan praktek-praktek politik yang tidak bermoral harus dihindari sepenuhnya, karena hal tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan merusak fondasi demokrasi.

Dalam rangka memastikan bahwa ruang publik digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, pendidikan politik yang kuat juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat harus didorong untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak politik, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang aktif. Etika politik memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku politik yang sadar dan bertanggung jawab di antara masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul ‘Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas’ (Angga et al., 2023) yang membahas mengenai media sosial sebagai wadah ruang publik untuk menyampaikan ide bagi banyak orang. Fokus tulisan ini menganalisis etika komunikasi netizen media sosial. Media sosial sebagai ruang publik dimanfaatkan sebagai wadah kebebasan berekspresi netizen juga memerlukan etika komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan opini yang disampaikan dalam kolom komentar sering kali tanpa suatu pertimbangan rasional. Media sosial hanya dipandang sebagai ruang publik biasa tanpa ada unsur rasionalitas yang saling menghargai hak masing-masing dan mendorong terbentuknya solidaritas sosial. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian tersebut fokus mengkaji etika komunikasi di ruang publik dunia maya, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji etika politik dalam pemanfaatan ruang publik.

Penelitian selanjutnya yang berjudul ‘Urgensi Etika bagi Komunikasi Politik’ (Carlos, 2023). Menurut penelitian ini, McNair menunjukkan interaksi politik di ruang publik merupakan arena yang kotor dan tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi. Selain itu, komunikasi politik merupakan problematika filosofis, dalam hal ini, etika. Etika komunikasi politik justru perlu setelah menimbang berbahayanya komunikasi politik tanpa etika. Penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang etika komunikasi politik dibandingkan dengan penelitian hanya etika politik. Sedangkan penelitian yang ditulis saat ini lebih fokus mengkaji etika politik dalam memanfaatkan ruang publik. Dimana lokus kajiannya adalah pada media massa yang dibatasi agar tidak memonopoli ruang publik dalam negara demokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis etika politik dalam pemanfaatan ruang publik di Indonesia. Bagian pembahasan dalam tulisan ini menguraikan tentang pentingnya etika politik dalam ruang publik. Selain itu, akan dibahas pula mengenai salah satu ruang publik, yaitu media massa dan kebebasan berekspresi dalam negara Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam artikel ini adalah ‘bagaimana etika politik dalam pemanfaatan ruang publik?’

METODE

Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dalam menguraikan permasalahan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah, buku dan dokumen resmi pemerintah sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *literature review*. Teknik analisis data menggunakan Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus-menerus (Abdussamad, 2021). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yang pertama adalah reduksi data, dimana data-data dipisahkan mana yang mendukung dan terkait dengan penelitian dan mana yang tidak terkait. Tahapan reduksi data juga membantu peneliti untuk lebih memfokuskan data terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Tahap kedua adalah *data display* atau penyajian data. Data-data terkait pemanfaatan ruang publik di Indonesia diperoleh dan disajikan melalui penggambaran secara deskriptif. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, dimana setelah data berhasil dianalisis menggunakan teori kebijakan, maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

- **Etika Politik dalam Ruang Publik**

Saat ini Indonesia berada pada era kebebasan berpolitik setelah melampaui masa kelam berpolitik. Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, Indonesia memasuki masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Dalam masa transisi itu, dilakukan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk membangun tatanan kehidupan politik baru yang demokratis. Dalam perjalanannya, tatanan kehidupan politik yang demokratis ini, lambat laun tergerus oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Ini dapat terlihat bagaimana saat ini para elit berkuasa lebih mudah menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai etik dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Etika politik dalam ruang publik menunjukkan bahwa saat ini banyak kalangan elit politik berpolitik dengan tidak berpedoman pada etika. Realitas menunjukkan bahwa mereka berpolitik tanpa rasionalitas dan mengedepankan emosi serta kepentingan kelompok, tidak lagi mengutamakan kepentingan berbangsa. Para elite politik yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap terjadinya konflik masyarakat dan tumbuhnya budaya kekerasan. Elite bisa bersikap seperti itu karena mereka sebagian besar berasal dari partai politik atau kelompok-kelompok yang berbasis primordial, sehingga elite politik pun cenderung berperilaku yang sama dengan perilaku pendukungnya. Bahkan elite seperti ini merasa halal untuk membenturkan massa atau menggunakan massa untuk mendukung langkah politiknya. Elite serta massa yang cenderung berpolitik dengan mengabaikan etika, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya kekuatan yang berbasis primordial di negeri ini cenderung berimbang.

Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan (Kosasih, 2023). Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan

sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara (Candra, 2024). Di Indonesia Eika Politik dan Pemerintahan diatur dalam Ketetapan MPR RI No.VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa (*Ketetapan MPR RI No.VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa*, 2001). Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Dalam TAP MPR tersebut juga dinyatakan bahwa Etika Politik dan Pemerintahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika politik mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. TAP ini mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk mengamalkan etika kehidupan berbangsa. Untuk berpolitik dengan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara, paling tidak dibutuhkan dua syarat, yaitu Ada kedewasaan untuk dialog dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok.

Etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan (Diana & Fatkhan, 2023).

Salah satu upaya pelaksanaan etika politik, menurut Dennis F Thompson, adalah dengan mengurangi privasi pejabat negara, di mana privasi merupakan salah satu fungsi dari penerapan

etika politik dalam suatu negara (Putu, 2022). Menurutnya, para pejabat sesungguhnya bukan warga negara biasa. Mereka memiliki kekuasaan atas warga negara, dan bagaimanapun, mereka merupakan representasi dari warga negara. Perbedaan-perbedaan signifikan antara pejabat negara dan warga negara membuat berkurangnya wilayah kehidupan pribadi (*privacy*) para pejabat negara. Oleh karena itu, *privacy* pejabat negara tidak harus dijaga, bila perlu dikorbankan untuk menjaga keutuhan demokrasi dan menjaga kepercayaan warga negara. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil, sebesar dan atau seluas apa pun, sedikit banyak, berpengaruh bagi kehidupan warga negara.

Jadi, hal tersebut layak jika masyarakat tahu secara detail, mengenai kehidupan pejabat-pejabat negara. Pengetahuan tersebut merupakan bagian dari garansi dan kontrol publik yang membuat warga negara menaruh kepercayaan pada pejabat negara yang telah dipilihnya. Warga negara harus punya keyakinan bahwa pejabat negara yang dipilihnya benar-benar memiliki pribadi yang jujur serta tidak mempergunakan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.

Selain itu, etika politik berperan dalam membuka ruang publik dengan melihat bahwa perlu diperbanyak ruang publik yang memberi kesempatan politisi dan masyarakat saling berkomunikasi. Terbukanya kesempatan berbagi antartokoh, politisi, media, akademisi, birokrat, mahasiswa dan masyarakat lainnya memberi penyegaran-penyegaran edukatif pada semua pihak. Selain itu, untuk mengurangi prasangka atau peluang terjadinya pelanggaran etika politik yang diharapkan akan dapat memberi ruang terbuka pada peningkatan rasional dan daya kritis publik; mempersiapkan calon politisi untuk menjadi politisi beretika serta mengingatkan politisi untuk beretika (Mulya, 2023).

Pembahasan

- Kebebasan Berekspresi dan Media Massa

Salah satu parameter melihat tingkat kebebasan berekspresi dapat dilakukan dengan memperhatikan sejauh mana akses masyarakat menggunakan ruang publik. Misalnya frekuensi publik yang selama ini kerap digunakan televisi dan radio untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media saat ini yang diperuntukkan untuk publik malah cenderung dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi pemilik media. Sehingga media sifatnya seolah menjadi milik pribadi.

Padahal, ketika menggunakan ruang publik, pemilik media yang bersangkutan tidak boleh memaksakan kepentingan pribadi. Misalnya, ada pemilik media yang akan maju dalam Pemilu. Kemudian, secara intensif media tersebut memberitakan perihal tentang kegiatan politik si pemilik media. Media sebagai bagian dari ujung tombak kebebasan berekspresi, oleh karenanya harus terlepas dari intervensi pemilik media, terkait bidang sosial-politik (Launa & Lusianawati, 2020).

Pada prinsipnya negara wajib memelihara berbagai ruang publik sebagai bentuk pelestarian hak yang diperoleh oleh warga negara untuk mewujudkan kehendak bersama. Ruang publik merupakan wilayah etis-normatif yang terbuka bagi semua akses individu untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Karena itu, wilayah itu tunduk di bawah peraturan dan norma

sosial. Dalam perspektif Hegelian, ruang ini adalah sintesis dari berbagai kehendak bebas perseorangan untuk mewujudkan kehendak bersama masyarakat atas nama negara.

Sebagai ilustrasi, kaum sofis di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi adalah kelompok intelektual yang berhasil membawa masyarakat Athena pada iklim pemikiran kritis melalui pemanfaatan ruang publik. Kaum sofis memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan untuk mencapai kecerdasan publik. Hasil pengaruh itu, misalnya, prinsip-prinsip logika formal yang digunakan Aristoteles masih digunakan hingga sekarang 2.500 tahun kemudian (Maksum, 2023).

Dalam koridor normatif, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyiaran adalah benteng terakhir bagi publik untuk meningkatkan kualitas intelektual warga bangsa. Pada kenyataannya UU tersebut tidak mengakomodasi mekanisme perawatan ruang publik. Pasal 18 yang menguraikan tentang kepemilikan media memperbolehkan setiap pemilik modal memiliki berbagai media massa (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyiaran*, 2012). Hal itu terjadi karena istilah yang digunakan adalah “membatasi”, bukan “melarang”. Lemahnya Pasal 18 UU No 12/2012 berimplikasi terhadap ketidakmampuan negara mewujudkan kehendak bersama.

Amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyiaran tertuju pada penyediaan informasi yang bermanfaat bagi publik. Dalam kerangka itulah, Pasal 34 Ayat 4 menyebutkan obyektivitas informasi (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyiaran*, 2012). Disebutkan, isi siaran wajib menjaga netralitas sehingga tidak boleh mengutamakan kepentingan atau golongan tertentu. Akan tetapi, hal yang terjadi adalah ruang publik dijadikan sebagai ajang mewujudkan kehendak bebas pribadi dan kelompok, sehingga media publik ternyata tidak membawa pendidikan yang membuat masyarakat cerdas. Penguasaan saluran publik dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan-kepentingan golongan.

Kebebasan berekspresi dalam media massa adalah salah satu pilar utama dalam menjaga etika politik dalam ruang publik karena beberapa alasan yang sangat penting. Pertama-tama, kebebasan berekspresi dalam media massa memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang luas terhadap informasi. Dengan adanya kebebasan berekspresi, media massa dapat menyampaikan berbagai sudut pandang, opini, dan laporan tentang isu-isu politik yang relevan. Ini memberi masyarakat kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah yang mempengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, kebebasan berekspresi dalam media massa memungkinkan adanya pengawasan terhadap kekuasaan politik. Media massa berperan sebagai penjaga dan pengawas bagi para pemimpin politik. Mereka dapat menginvestigasi, mengkritik, dan mengungkapkan ketidakberesan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik. Ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan politik, yang merupakan aspek penting dari etika politik.

Ketiga, kebebasan berekspresi dalam media massa membantu memperkuat partisipasi politik masyarakat. Dengan menyediakan platform untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, media massa memungkinkan warga untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Hal ini menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan demokratis, di mana berbagai kelompok dan individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

Keempat, kebebasan berekspresi dalam media massa mendukung perkembangan budaya politik yang sehat. Dengan memfasilitasi dialog terbuka, debat, dan pertukaran ide, media massa membantu membentuk sikap yang kritis dan informasi bagi masyarakat. Ini mendorong budaya politik yang didasarkan pada penalaran rasional, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan rasa hormat terhadap hak-hak individu.

Secara keseluruhan, kebebasan berekspresi dalam media massa sangat penting dalam menjaga etika politik dalam ruang publik karena membantu mempromosikan akses terhadap informasi, mengawasi kekuasaan politik, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memperkuat budaya politik yang sehat. Dengan memastikan kebebasan media massa dihormati dan dilindungi, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan, inklusif, dan bertanggung jawab.

Kebebasan berekspresi dan media massa adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Mereka memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengkritik pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, dalam konteks pemanfaatan ruang publik, kebebasan ini harus diimbangi dengan penerapan etika politik yang baik agar tidak disalahgunakan atau merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pertama-tama, kebebasan berekspresi dan media massa memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat. Etika politik mengarahkan politisi dan media untuk menyajikan informasi dengan akurat dan objektif, tanpa menyembunyikan fakta atau memanipulasi opini publik. Ini memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan fakta dalam konteks politik.

Selanjutnya, kebebasan berekspresi memungkinkan individu dan kelompok untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka terhadap pemerintah dan kebijakan publik. Namun, dalam ruang publik, politisi yang beretika harus mendengarkan dengan seksama pendapat yang disampaikan dan memberikan tanggapan yang terbuka dan konstruktif. Mereka tidak boleh menekan atau mengintimidasi pihak yang memiliki pandangan berbeda, melainkan mempromosikan dialog yang sehat dan inklusif.

Di sisi lain, media massa memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan publik. Mereka bertanggung jawab untuk mengungkapkan ketidakberesan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin politik. Namun, dalam melakukan pelaporan mereka, media harus mematuhi standar etika jurnalistik yang tinggi, seperti memeriksa fakta dengan cermat, memberikan ruang bagi sudut pandang yang beragam, dan menghindari sensasionalisme atau pembingkaiannya yang bias.

Keterkaitan antara kebebasan berekspresi, media massa, dan etika politik menjadi sangat penting dalam mewujudkan ruang publik yang sehat dan berfungsi dengan baik. Tanpa adanya etika politik yang baik, kebebasan berekspresi dan media massa dapat disalahgunakan untuk memperkuat narasi politik yang sempit atau menghasilkan informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan mengikuti prinsip-prinsip etika politik, politisi dan media massa dapat menjaga integritas ruang publik, mempromosikan dialog yang inklusif, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diprioritaskan di atas kepentingan pribadi atau politik.

Seorang politisi yang menerapkan etika politik akan memastikan bahwa segala keputusan dan aktivitas yang terjadi di ruang publik dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Mereka akan mengadakan pertemuan terbuka, memberikan laporan secara berkala kepada masyarakat, dan memastikan bahwa informasi tentang penggunaan dana publik tersedia secara jelas dan mudah diakses oleh semua orang. Politisi yang menghormati etika politik akan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mereka akan mendengarkan pendapat dan kebutuhan masyarakat luas, termasuk kelompok minoritas dan terpinggirkan, sebelum membuat keputusan yang memengaruhi ruang publik.

Etika politik menuntut penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Politisi yang etis akan mempromosikan diskusi yang santun dan menghargai sudut pandang yang berbeda, tanpa mencoba untuk mengintimidasi atau menekan lawan politik atau kelompok masyarakat tertentu. Etika politik menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang, tanpa memandang latar belakang politik, agama, suku, atau status sosial. Politisi yang etis akan memastikan bahwa kebijakan yang mereka usulkan dan implementasikan berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kesetaraan di dalam ruang publik.\

Seorang politisi yang beretika akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa keputusan politik mereka bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mempromosikan keadilan sosial di masyarakat. Etika politik menuntut politisi untuk menghindari konflik kepentingan dan bertindak secara transparan dalam hal potensi konflik kepentingan. Politisi yang etis akan mengungkapkan semua hubungan atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, dan mereka akan menarik diri dari keputusan yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi. Politisi yang mematuhi etika politik akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka serta menunjukkan integritas dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka akan menghindari korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, dan mereka akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban publik mereka.

PENUTUP

Pentingnya etika politik dalam ruang publik adalah dibatasinya korporasi-korporasi media massa untuk menguasai secara penuh media untuk kepentingan pribadi mereka. Khususnya para elit politik, di mana saat ini banyak kalangan elit politik berpolitik dengan tidak berpedoman pada etika. Untuk mencapai kepentingannya, para elit politik menggunakan media massa dalam memenangkan berbagai pemilu. Sehingga, etika politik dalam pemanfaatan ruang publik khususnya media massa masih kurang penerapannya di Indonesia.

Media massa sebagai salah satu bentuk ruang publik, di mana masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui transparansi kebijakan pemerintah. Akan tetapi ketika media massa digunakan oleh pemiliknya untuk mencapai kepentingan dalam kegiatan politik, maka kebebasan berekspresi masyarakat menjadi terbatas di negara demokrasi. Sehingga, diperlukan etika politik dalam pemanfaatan ruang publik dalam kebebasan berekspresi, salah satunya adalah media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Angga, S., Alfredo, A., & Rikardus, F. (2023). *Communication Ethics of Indonesian Netizens on Social Media as a Democratic Space in the Study of Public Sphere by Jurgen Habermas*. 6(3). <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.59229>
- Candra, M. (2024). *Birokrasi dan Good Governance*. Prenada Media.
- Carlos, M. (2023). Urgensi Etika bagi Komunikasi Politik. *Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 4(2). <https://jurnal.stfsp.ac.id/index.php/Media>
- Diana, L., & Fatkhan, M. (2023). Analisis Etika Politik Al-Mawardi Atas Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun 2019. *Journal of Islamic Discourses*, 6(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/4467>
- Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa*. (2001).
- Kosasih, A. (2023). *Legislasi dan Perwakilan Politik*. Indigo Media.
- Launa, L., & Lusianawati, H. (2020). *Diskursus Ideologi Media: Dari Perspektif Liberal-Pluralis Hingga Post-Strukturalis*.
- Maksum, A. (2023). *Filsafat Ilmu Sosial*. Universitas Brawijaya Press.
- Mulya, H. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Putu, N. (2022). *Buku Ajar Prinsip Administrasi Publik*. Jagat.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyiaran*. (2012).